

Kremlin Mengaku Menyadari Rencana AS Jatuhkan Sanksi Baru pada Rusia

MOSKOW(IM)- Kremlin menyadari kemungkinan sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia dan saat ini sedang mempertimbangkan berbagai opsi. Kremlin juga mencatat bahwa pengenalan pembatasan tidak tergantung pada kehendak Presiden AS, Joe Biden.

"Kami mengetahui sanksi yang akan datang, kemungkinan sanksi yang telah dikodifikasi. Intinya, beberapa sanksi telah dikodifikasi dan penerapannya bahkan tidak bergantung pada kehendak presiden AS," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Kremlin, jelasnya, juga telah mendengar klaim yang dibuat setelah pertemuan antara Joe Biden dan Vladimir Putin, bahwa AS akan tetap pada kebijakannya terhadap proyek Nord Stream 2. "Kami berharap bahwa kami akan dapat melanjutkan dialog kami dengan Amerika, dan kami juga pasti akan terus bekerja dengan mitra Eropa kami untuk menyelesaikan proyek dan meluncurkannya sesegera mungkin" sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (22/6).

Peskov kemudian mengatakan pernyataan Moskwa tentang pendekatan konstruktif pada pertemuan puncak Biden dan Putin tidak berarti mengabaikan penilaian yang bijaksana tentang hubungan bilateral, karena pragmatisme tetap menjadi prioritas.

"Kata-kata Putin tentang sikap konstruktif di pertemuan Jenewa tidak menunjukkan bahwa kami telah meninggalkan penilaian yang bijaksana tentang hubungan kami dengan AS, di mana pragmatisme dan 'ketenangan' adalah prioritas kami," ucapnya.

"Hasil yang konstruktif dan positif dari pertemuan tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa AS akan meninggalkan esensi dari kebijakannya untuk menahani Rusia. Kami sadar bahwa ini akan berlanjut," tukasnya. **gul**

Spanyol Bebaskan Sembilan Pemimpin Kemerdekaan Katalunya

BARCELONA (IM) - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan pemerintahnya akan mengampuni sembilan pemimpin upaya kemerdekaan Katalunya 2017 pada Selasa (22/6). Keputusan ini diambil sebagai langkah pertama untuk mengakhiri konflik politik atas wilayah tersebut.

"Saya yakin mengeluarkan sembilan orang ini dari penjara adalah pesan kerukunan yang jelas," kata Sanchez yang dihadiri oleh sekitar 300 anggota masyarakat sipil Katalunya.

Saat Sanchez berbicara di gedung opera Barcelona, dia menyatakan bahwa dia warga Spanyol mencintai Katalunya. Dia berbicara dengan bendera Spanyol, Katalunya, dan Uni Eropa di belakangnya.

Jajak pendapat menunjukkan sekitar 60 persen orang Spanyol menentang pembebasan para politisi yang dihukum karena peran mereka dalam referendum kemerdekaan yang tidak sah dan deklarasi kemerdekaan yang berumur pendek. Madrid merespons pada saat itu dengan memberlakukan pengawasan langsung atas wilayah tersebut dan 2017-2018.

Namun Sanchez bertaruh sudah saatnya untuk pertaruhan politik dengan upaya melemahkan dorongan kemerdekaan dan menyelesaikan

krisis politik terbesar negara itu dalam beberapa dekade. "Kami tidak berharap bahwa mereka yang mencari kemerdekaan akan mengubah cita-cita mereka, tetapi kami berharap (mereka) memahami bahwa tidak ada jalan di luar hukum," kata Sanchez.

Kesempatan kabinet berikutnya untuk memberi stempel pengampunan datang pada pertemuannya pada Selasa. Acara ini akan mengarah pada pembebasan separatis dari penjara beberapa hari kemudian.

Sanchez ingin meredakan ketegangan di wilayah timur laut dan memulai negosiasi antara pemerintah pusat dan otoritas Katalunya. "Untuk mencapai kesepakatan seseorang harus membuat langkah pertama. Pemerintah Spanyol akan membuat langkah pertama itu sekarang," katanya menekankan biaya sosial untuk menjaga agar konflik tetap membara terlalu tinggi.

Kepala pemerintahan Katalunya Pere Aragonès mengatakan pekan lalu bahwa pengampunan itu akan menjadi isyarat pertama yang disambut baik untuk memulai dialog. Hanya saja, dia menilai keputusan itu tidak cukup. Dia menuntut amnesti bagi semua yang terlibat dalam peristiwa 2017, yang dapat memberi manfaat bagi sekitar 3.000 orang. **ans**



KASUS KRIMINALITAS DI NEW YORK – AMERIKA SERIKAT

Oneil Wallace mendapat pelukan saat peti jenazah adiknya yang berusia 10 tahun Justin Wallace yang tewas tertembak saat seorang penembak menembak sebuah rumah pada 5 Juni lalu di wilayah Far Rockway, Queens, dimasukkan ke mobil jenazah setelah misa di Full Gospel Tabernacle di Kota New York, Amerika Serikat, Senin (21/6).

PBB: 8.500 Anak Dijadikan Tentara di Wilayah Konflik

Sekitar 8.500 anak-anak digunakan sebagai tentara tahun lalu dalam berbagai konflik.

NEW YORK (IM) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan lebih dari 8.500 anak-anak digunakan sebagai tentara pada tahun lalu dalam berbagai konflik di seluruh dunia. Sementara hampir 2.700 lainnya meninggal dunia dalam medan perang.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan laporan tahunan tentang anak-anak dan konflik bersenjata kepada Dewan Keamanan. Laporan tersebut termasuk

pembunuhan, melukai dan pelecehan seksual terhadap anak-anak, penculikan atau perekrutan, penolakan akses bantuan, dan penargetan sekolah dan rumah sakit.

Laporan tersebut memverifikasi bahwa pelanggaran telah dilakukan terhadap 19.379 anak dalam 21 konflik. Pelanggaran terbanyak dilakukan di Somalia, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Suriah, dan Yaman pada 2020.

Laporan itu memverifikasi

8.521 anak-anak digunakan sebagai tentara tahun lalu. Sementara 2.674 anak lainnya meninggal dunia dan 5.748 terluka dalam berbagai konflik.

Laporan tersebut juga memasukkan daftar hitam negara-negara yang menggunakan anak-anak sebagai tentara di medan perang. Daftar hitam itu bertujuan untuk memperlakukan pihak-pihak yang berkonflik dengan harapan mendorong mereka untuk menerapkan langkah-langkah dalam melindungi anak-anak.

Daftar hitam tersebut telah lama menjadi kontroversi di antara para diplomat. Mereka mengatakan Arab Saudi dan Israel memberikan tekanan

dalam beberapa tahun terakhir agar mereka tidak masuk ke dalam daftar hitam.

Israel tidak pernah masuk ke dalam daftar hitam itu. Sementara koalisi militer yang dipimpin Saudi telah dihapus dari daftar pada 2020, beberapa tahun setelah pertama kali disebutkan dan dipermalukan karena membunuh serta melukai anak-anak di Yaman.

Dalam upaya meredakan kontroversi seputar laporan tersebut, daftar hitam yang dirilis pada 2017 oleh Guterres dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama berisi daftar pihak yang telah menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak

dan kategori kedua termasuk pihak-pihak yang belum menerapkan upaya perlindungan terhadap anak-anak.

Ada beberapa perubahan signifikan pada daftar yang dirilis pada Selasa (22/6). Satu-satunya negara yang disebutkan dalam daftar karena tidak menerapkan tindakan adalah militer Myanmar, untuk pembunuhan, melukai dan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Pihak lainnya yaitu pasukan pemerintah Suriah untuk perekrutan anak-anak, pembunuhan, melukai dan kekerasan seksual terhadap anak-anak. dan serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. **tom**

Raisi Menolak Bertemu Biden Meski AS Penuhi Tuntutan Iran

TEHERAN (IM) - Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi mengisyaratkan dia tidak akan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam keadaan apapun, termasuk jika Washington memenuhi semua tuntutan Teheran dalam pembicaraan Wina yang sedang berlangsung untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.

Raisi merupakan ulama ultrakonservatif dan sekutu dekat pemimpin tertinggi

Iran. Dia berbicara pada konferensi pers pertamanya sejak memenangkan pemilu presiden Iran pada Jumat.

Dia akan mengambil alih jabatan presiden dari Hassan Rouhani pada awal Agustus.

Ditanya apakah dia bersedia bertemu Biden untuk menyelesaikan perselisihan antara AS dan Iran jika Washington mencabut sanksi terhadap Teheran dan memenuhi tuntutan Iran terlebih dahulu, Raisi menjawab dengan tegas, "Tidak."

AS dan Iran telah terli-

bat dalam pembicaraan tidak langsung di Wina sejak April untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.

AS mundur dari kesepakatan nuklir Iran di era mantan Presiden Donald Trump

"Semua sanksi yang dijatuhkan kepada Iran harus dicabut dan diverifikasi oleh Teheran," ungkap dia.

Raisi menegaskan kembali posisi Iran bahwa program rudal balistik dan dukungannya terhadap milisi regional "tidak dapat dinegosiasikan."

Ditanya tentang perannya dalam eksekusi massal tahanan politik Iran pada 1988, Raisi menggambarkan dirinya sebagai "pembela hak asasi manusia."

"Jika seorang jaksa membela hak-hak rakyat dan keamanan masyarakat, dia harus dipuji dan didorong. Saya bangga telah membela keamanan di mana pun saya berada sebagai jaksa," ungkap Raisi, yang merupakan wakil jaksa Teheran pada 1988.

Kelompok hak asasi mengatakan Raisi adalah anggota terkemuka dari apa yang ke-

mudian dikenal sebagai "komite kematian" yakni sekelompok pejabat peradilan dan intelijen Iran yang dibentuk Pemimpin Tertinggi Ruhollah Khomeini untuk mengawasi eksekusi massal ribuan tahanan politik pada 1988.

Kelompok hak asasi memperkirakan sebanyak 5.000 orang dieksekusi. Raisi dikenai sanksi oleh AS pada 2019 karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksekusi 1988. **ans**

Terlibat Perdagangan Manusia, Dua Ratu TikTok Mesir Dipenjara 6 dan 10 Tahun

KAIRO (IM)-Pengadilan Mesir menjatuhkan hukuman masing-masing enam dan 10 tahun penjara pada dua wanita influencer TikTok dalam kasus perdagangan manusia.

Informasi itu diungkapkan pengadilan yang mewakili salah satu dari kedua influencer Haneen Hossam dan Mowada al-Adham itu.

Putusan pengadilan terhadap Haneen Hossam dan Mowada al-Adham dijatuhkan pada Minggu malam oleh Pengadilan Kriminal Kairo.

Putusan pengadilan terhadap Haneen Hossam dan Mowada al-Adham dijatuhkan pada Minggu malam oleh Pengadilan Kriminal Kairo.

"Adham dijatuhi hukuman enam tahun penjara," ungkap pengacaranya Saber Sokkar.

Adapun Hossam dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Keduanya dituntut dalam kasus "perdagangan manusia."

"Tuduhan lainnya termasuk merusak nilai-nilai keluarga, menghasut pesta pora dan mendorong perempuan muda mempraktikkan hubungan seksual," papar Sokkar.

"Adham hadir di pengadilan untuk putusan itu tetapi Hossam, yang masih diburu, dijatuhi hukuman in absentia," ungkap pengacara itu.

Dia mengatakan Hossam diberi hukuman yang lebih tinggi karena dia tidak muncul

di pengadilan pada sidang sebelumnya.

"Para wanita dapat mengajukan banding," papar pengadilan itu.

Mereka ditangkap tahun lalu dan masing-masing dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena tuduhan "menyerang nilai-nilai masyarakat" dalam video yang dipublikasikan di TikTok.

Dalam satu video, Hossam memberi tahu 1,3 juta penganggannya bahwa gadis-gadis dapat bekerja untuknya demi uang. Dia juga dituntut tahun lalu melakukan "pesta pora" dan "perdagangan manusia."

Tetapi pada Januari pengadilan banding membebaskan kedua wanita itu.

Penargetan influencer perempuan telah menghidupkan kembali perdebatan sengit di negara Muslim yang sangat konservatif itu tentang apa yang merupakan kebebasan individu dan nilai-nilai sosial.

Namun tindakan keras itu bukan hal yang luar biasa di Mesir, di mana beberapa penari perut dan penyanyi pop telah menjadi sasaran dalam beberapa tahun terakhir karena konten online yang dianggap terlalu cabul atau sugestif.

Kelompok hak asasi mengatakan semakin banyak kebebasan telah dibatasi di Mesir di era Presiden Abdel Fattah al-Sisi, yang menjabat pada 2014. **gul**

873 Orang Tewas Sejak Kudeta Militer Myanmar

MYANMAR (IM)-Kelompok masyarakat sipil melaporkan korban tewas sejak kudeta militer Myanmar berjumlah 873 orang. Berdasarkan laporan Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP), Selasa dini hari, ada penambahan dua korban asal Negara Bagian Mon yang tewas pada Minggu dan didokumentasikan Senin (21/6).

Hingga 21 Juni, AAPP

mencatat 5.045 orang masih ditahan, dengan 196 orang di antaranya dijatuhi hukuman. AAPP mengungkapkan pasukan junta menembak dua pemuda bernama Moe Zaw Oo dan Zaw Min Oo hingga tewas karena tidak menghening sepeka motornya di pos pemeriksaan di Mawlamyine, Negara Bagian Mon, Minggu malam.

Pada Senin pagi, seorang

penulis dan kolumnis di Bago Weekly Journal, Nyein (Bago) alias Aung Ko, dan keponakannya, Zaw Lin Htwe (16) ditangkap di rumah mereka di Bago.

Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Militer beralih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan. **tom**



PEMILU ETHIOPIA

Pemilih mengantri di depan tempat pemungutan suara pada pemilihan parlemen dan wilayah di Addis Ababa, Ethiopia, Senin (21/6).



IMIGRAN EROPA

Seorang imigran minum sambil berjalan di dermaga setelah turun di pulau Sisilia Lampedusa, Italia, Senin (21/6).

Warga yang Menolak Divaksin Terancam Penjara di Filipina

MANILA (IM) - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan warga yang menolak vaksinasi untuk mencegah infeksi Covid-19 dapat dikenakan hukuman penjara. Sejak ini, Filipina telah menjadi negara dengan kasus Covid-19 terbesar di Asia. Tercatat ada lebih dari 1,3 juta kasus yang dikonfirmasi dan terdapat lebih dari 23.000 kematian. "Anda memilih vaksin atau saya akan memenjarakan Anda," ujar Duterte dalam pidato yang disiarkan televisi negara pada Senin (22/6) dilansir France 24.

Pernyataan Duterte datang setelah laporan sejumlah lokasi vaksinasi di Manila sepi dari peserta. Meski demikian, ancaman penjara dianggap bertentangan dengan pernyataan pejabat kesehatan negara sebelumnya yang mengatakan bahwa bagaimanapun vaksin bersifat sukarela. "Jangan salah paham, ada krisis di negara ini. Saya jengkel dengan warga Filipina yang mengabaikan pemerintah," jelas Duterte.

Hingga 20 Juni, tercatat ada 2,1 juta warga di Filipina yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara penuh. Ini adalah kemajuan yang cukup lambat mengingat pemerintah Filipina memiliki target mengimunitasi hingga 70 juta orang tahun ini di negara berpenduduk 110 juta.

Duterte telah dikritik karena pendekatannya yang keras untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Ia telah mendukung keputusannya untuk tidak membiarkan sekolah dibuka kembali.

Hingga 20 Juni, tercatat ada 2,1 juta warga di Filipina yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara penuh. Ini adalah kemajuan yang cukup lambat mengingat pemerintah Filipina memiliki target mengimunitasi hingga 70 juta orang tahun ini di negara berpenduduk 110 juta. Duterte telah dikritik karena pendekatannya yang keras untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Ia telah mendukung keputusannya untuk tidak membiarkan sekolah dibuka kembali. **gul**